

TESIS

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN PASIR, KERIKIL
DAN BATU DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP**



R. JATI BAYUBROTO

No. Mhs.: 07.1201/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

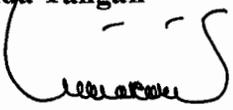
2009

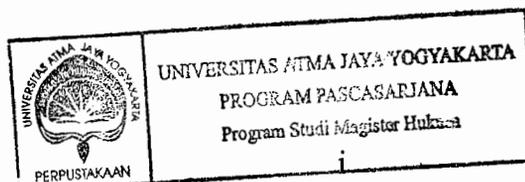


**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Nama : R. JATI BAYUBROTO
Nomor Mahasiswa : 07.1201/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Nama Dosen Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
1. Prof. Dr.Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum.	
2. Hyronimus Rhiti, SH., LL.M.	





**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

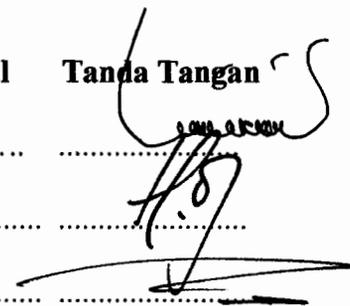
PENGESAHAN TESIS

Nama : R. JATI BAYUBROTO
Nomor Mahasiswa : 07.1201/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Nama Dosen Penguji
Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum.
Hyronimus Rhity, SH., LL.M.
FX. Endro Susilo, SH., LL.M.

Tanggal Tanda Tangan

.....
.....
.....



Ketua Program Studi



PROGRAM
Dr. Paulinus Suge, SH., M.Hum.

INTISARI

Penulisan thesis yang berjudul “*Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*” ini dilatarbelakangi adanya kerusakan lingkungan hidup serta bangunan-bangunan pengairan di sekitarnya akibat maraknya penambangan liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana instrumen hukum yang ada dapat diterapkan dan ditegakkan untuk mengatasi permasalahan yang ada

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan berbagai literature yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini serta diskusi dengan berbagai pihak untuk mendapat masukan dalam penulisan tesis ini.

Penelitian ini menemukan bahwa ada dua instrumen hukum yang mengatur masalah penambangan pasir, kerikil, dan batu di lingkungan sungai dan pesisir di wilayah Kabupaten Bantul yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir. Namun demikian, kedua peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan norma hukum positif yang ada, dimana masalah lingkungan hidup dan pertambangan rakyat telah menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul seharusnya segera membuat peraturan daerah yang komprehensif guna mengatur masalah pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kata-kata kunci: ”Lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, peraturan daerah, tertib dan sejahtera”.

ABSTRACT

The thesis *“Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”* (The law enforcement of the Local Regulation of Bantul Regency No. 16, 2003 about the conservation of sands, pebbles, and stones in the rivers and beaches by the Satuan Pamong Praja as the effort of the Environmental Functions Conservation) is based on the environmental and the surrounding water buildings damage because of the spreading of the illegal mining. The objective of the thesis is to know how the existing law instrument can be applied and enforced to solve the existing problems.

The research is carried out by searching for the law instruments and some related literatures and by discussing with many parties to get some inputs for writing the thesis.

The research found the problems that there are two existing law instruments which regulate the sands, pebble, and stones mining around the rivers and beaches in Bantul. They are the Perda DIY Number 3, 1994 (Yogyakarta Special Province regulation number 3, 1994) about Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (level C mineral mining) and Perda Bantul number 16, 2003 (Bantul Regency regulation number 16, 2003) about the conservation of sands, pebbles, and stones in the rivers and beaches. However, both of the regulations are not in line with the existing positive law anymore where environmental problems and public mining have been the authority of regency/city government. There fore Bantul Regency should have moth comprehensive regulation to manade mining which is in the line with the law number 4, 2009 about Minerals and Coal Mining.

Keywords: “Environment, Regency/City Government, Regency Regulation, disipline and welfare”.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan tesis dengan judul “Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”. Alasan pemilihan judul ini dilatarbelakangi oleh rasa keprihatinan penulis terhadap kerusakan lingkungan hidup di sungai dan pesisir di wilayah Kabupaten Bantul akibat penambangan liar serta terhadap kehidupan para penambang pasir itu sendiri. Penulis menilai bahwa instrumen hukum yang ada belum dapat menyelesaikan problematika yang ada, yaitu masalah kerusakan lingkungan hidup dan kebutuhan hidup masyarakat. Penulis berharap, tesis ini tidak hanya berhenti sebagai syarat akademik, tetapi akan dapat bermanfaat untuk ikut mewujudkan adanya instrumen hukum yang tepat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Penulis menyadari segala keterbatasan yang ada dalam menyelesaikan proses pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Allah S.W.T, atas pemberian hidup-Nya;
2. Bapak Prof. Dr. Dibyo Prabowo, MSc., Rektor Universitas Atma Jaya

Yogyakarta;

3. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum., sebagai “Ibu” selama penulis menjalani masa studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Hyronimus Rhiti, SH., LLM., yang telah membimbing penulisan tesis saya dengan sabar, dan cara yang lebih jawa dari orang jawa.
5. Bapak, ibu para dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membagi ilmu dan membuka wawasan serta cara pandang dalam penyelesaian masalah.
6. Bapak Drs. Kandiawan NA, MM., Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang telah memberikan kesempatan dan motifasi untuk terus belajar.
7. Teman-teman anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, atas dorongan dan pengertiannya di saat saya meninggalkan tugas untuk kuliah.
8. Keluarga besar Ibu Suryoprodjo dan keluarga besar Bapak Ambyah, atas doa restunya yang terkabul.
9. Istri tercinta Six Dwi Mulyani, SE dan anak-anak tersayang, Meyra Winaryani dan Prima Juang Baghaskoro, yang selalu memberikan semangat dan motifasi melalui rasa cinta.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis berharap kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis ini, dan semoga bermanfaat.

Yogyakarta, Maret 2009

Penulis